

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya menjalankan berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Salah satu program unggulan BKKBN dalam mendukung pembangunan keluarga adalah Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan satuan wilayah setingkat desa atau dusun yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan seluruh program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Program ini tidak hanya fokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan keluarga. Dengan adanya Kampung KB, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas.

Seiring perkembangan teknologi informasi seperti sekarang, BKKBN kemudian memperkenalkan *Website* Kampung KB sebagai salah satu media pelaporan dan publikasi kegiatan di tingkat desa. *Website* ini menjadi bagian dari upaya transformasi digital BKKBN yang bertujuan untuk mempermudah

pelaporan, publikasi, dan pemantauan perkembangan Kampung KB di seluruh Indonesia. *Website* Kampung KB pertama kali diperkenalkan oleh BKKBN setelah Program Kampung Keluarga Berkualitas resmi diluncurkan secara nasional pada tahun 2016. Seiring dengan perkembangan program tersebut, BKKBN menyadari perlunya sistem informasi yang dapat menampilkan capaian program di setiap Kampung KB secara terbuka dan terintegrasi. Oleh karena itu, *Website* ini dibentuk sebagai wadah dokumentasi dan pelaporan digital yang dikelola langsung oleh kader, perangkat desa, dan penyuluh KB di wilayah masing-masing.

Secara umum, *Website* Kampung KB merupakan portal digital resmi yang menampilkan data dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing Kampung KB. Melalui *Website* ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait Profil Kampung KB (data wilayah, jumlah penduduk, dan potensi lokal), Program kerja dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan, Capaian hasil kegiatan (misalnya kegiatan penyuluhan, pelatihan, atau pemberdayaan keluarga), Dokumentasi foto dan video kegiatan, serta Data indikator keberhasilan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga). Dengan adanya sistem ini, *Website* Kampung KB berperan sebagai media transparansi publik dan sarana akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat desa. Pemerintah pusat dan daerah dapat memantau langsung sejauh mana pelaksanaan program Kampung KB di masing-masing wilayah melalui informasi yang diunggah di *Website* tersebut. Selain itu, masyarakat luas juga bisa mengakses

perkembangan program di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi dan keterbukaan informasi publik.

Dari sisi pengelolaan, *Website* Kampung KB dikelola secara kolaboratif antara kader Kampung KB, perangkat desa, dan Penyuluh KB. Kader bertugas mengumpulkan data kegiatan di lapangan, perangkat desa bertanggung jawab menyediakan informasi administratif, sementara Penyuluh KB berperan sebagai pembimbing dan pengawas agar pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari BKKBN. Penyuluh yang memiliki kinerja tinggi diharapkan dapat membina kader secara aktif, memastikan pelaporan berjalan dengan baik, dan mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan *Website*, BKKBN kemudian menetapkan sistem klasifikasi *Website* Kampung KB yang berfungsi untuk menilai sejauh mana *Website* tersebut aktif, lengkap, dan relevan dengan kondisi di lapangan. Klasifikasi ini merupakan pengelompokan tingkat kualitas *Website* berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti kelengkapan data, frekuensi pembaruan informasi, tampilan atau desain *Website*, keaktifan admin dalam melakukan pelaporan, serta keterpaduan antara data dan kegiatan di lapangan. Secara umum, klasifikasi *Website* dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari level dasar, berkembang, mandiri, hingga berkelanjutan. Semakin lengkap dan aktif *Website* tersebut dikelola, maka semakin tinggi pula klasifikasinya.

Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan fenomena bahwa meskipun *Website*/pelaporan digital sudah tersedia sebagai inovasi layanan publik, belum semua Kampung KB berhasil naik klasifikasi. Misalnya di

beberapa provinsi, klasifikasi “dasar” masih mendominasi, dengan persentase Kampung KB di tahap dasar yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap antara kebijakan/harapan program dengan realita di lapangan.

Lokasi kecamatan Lampihong sebagai bagian dari wilayah pelaksanaan program Kampung KB diperkirakan menghadapi kondisi serupa. Berdasarkan informasi dari penyuluh KB wilayah Binaan Balai KB Lampihong, sekitar 62% Kampung KB di Kecamatan Lampihong masih berada pada klasifikasi dasar. Kondisi ini dapat di lihat dari 17 desa yang masih berstatus dasar dari 27 desa kampung KB di Kec. Lampihong. Berikut rincian daftar desa kecamatan Lampihong beserta Klasifikasi Websitenya:

Tabel 1.1

Daftar Kampung KB Kec. Lampihong berserta Klasifikasi Website

No	Desa	Klasifikasi Website
1.	Lajar	Dasar
2.	Tanah Habang Kiri	Dasar
3.	Tampang	Dasar
4.	Sungai Tabuk	Dasar
5.	Simpang Tiga	Dasar
6.	Pimping	Dasar
7.	Panaitan	Dasar
8.	Matang Hanau	Dasar
9.	Lok Panginangan	Dasar
10.	Lok Hamawang	Dasar
11.	Lampihong Selatan	Dasar

No	Desa	Klasifikasi Website
12.	Lampihong Kiri	Dasar
13.	Lampihong Kanan	Dasar
14.	Kusambi hulu	Dasar
15.	Kusambi Hilir	Dasar
16.	Kandang Jaya	Dasar
17.	Hilir Pasar	Dasar
18.	Sungai Awang	Mandiri
19.	Matang Lurus	Mandiri
20.	Jungkal	Mandiri
21.	Teluk Karya	Berkelanjutan
22.	Tanah Habang Kanan	Berkelanjutan
23.	Pupuyuan	Berkelanjutan
24.	Mundar	Berkelanjutan
25.	Kupang	Berkelanjutan
26.	Jimamun	Berkelanjutan
27.	Batu Merah	Berkelanjutan

Sumber: Penulis

Berdasarkan wawancara langsung di Balai KB Kecamatan Lampihong, fenomena masalah secara rinci, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran Operasional Kegiatan dan Dukungan teknis

Anggaran operasional kegiatan dan dukungan teknis di butuhkan untuk menunjang kegiatan penyuluhan, rapat, pembinaan kader desa, dan kunjungan langsung ke lapangan. Keterbatasan anggaran juga berdampak

pada kurangnya pelatihan Penyuluh KB untuk kader desa. Akibatnya, masih banyak kader desa yang belum memahami cara menginput atau mengelola data sehingga beban kerja penyuluh bertambah dan proses pembaruan *Website* menjadi lebih lambat.

Kekurangan anggaran dan dukungan teknis mengakibatkan kualitas pengelolaan *Website* Kampung KB menurun dan pencapaian klasifikasi desa menjadi terhambat. Motivasi penyuluh dan kader pun dapat menurun karena pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah menjadi lebih berat akibat keterbatasan anggaran operasional kegiatan dan dukungan teknis.

2. Keterbatasan Penyuluh KB

Berdasarkan data di Balai KB Lampihong, diketahui bahwa jumlah penyuluh KB hanya sebanyak 4 orang yang membina 27 desa. Dari empat penyuluh tersebut, tiga orang masing-masing bertanggung jawab membina 7 desa, sedangkan satu orang lainnya membina 6 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu penyuluh KB harus menangani beberapa desa sekaligus, dengan tanggung jawab yang cukup besar dalam melakukan pembinaan, pendampingan, serta pelaporan kegiatan Kampung KB.

Keterbatasan jumlah penyuluh ini berdampak langsung terhadap intensitas pendampingan dan pembinaan di lapangan. Dengan cakupan kerja yang luas, penyuluh KB sering kali kesulitan membagi waktu secara efektif antara kegiatan lapangan (seperti penyuluhan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan kunjungan keluarga) dengan

kegiatan administratif seperti pelaporan dan pembaruan data *Website* Kampung KB.

3. Banyaknya Beban Kerja Penyuluh KB

Pekerjaan Penyuluh KB tidak hanya sebatas mengedukasi masyarakat, tetapi juga mencakup pengumpulan dan penginputan data ke *Website* Kampung KB, koordinasi dengan kader desa, monitoring pelaksanaan program, serta penyusunan laporan untuk Balai KB. Banyaknya tugas ini menjadikan beban kerja mereka cukup tinggi, terutama ketika seorang Penyuluh KB harus menangani beberapa desa sekaligus.

Beban kerja yang tinggi sering menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi penginputan data dan kualitas informasi di *Website* Kampung KB. Misalnya, keterbatasan waktu dapat menyebabkan data tidak terupdate secara rutin, atau kualitas pelaporan dan dokumentasi kegiatan menjadi kurang maksimal. Kondisi ini berdampak langsung pada upaya Penyuluh KB dalam meningkatkan klasifikasi *Website* Kampung KB di wilayah binaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan fenomena masalah yang di temui di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan klasifikasi *Website* Kampung KB. Penulis memutuskan mengambil judul penelitian **“Kinerja Penyuluh KB dalam Meningkatkan Klasifikasi Website Kampung KB di Wilayah Binaan Balai KB Lampihong”** guna Mengidentifikasi bentuk kinerja penyuluh KB dalam pengelolaan *Website* Kampung KB,

Mendeskripsikan strategi dan langkah-langkah yang dilakukan penyuluh KB dalam meningkatkan kualitas dan klasifikasi *Website* Kampung KB, serta Mengetahui kendala yang dihadapi penyuluh KB maupun pengelola Kampung KB dalam mengembangkan *Website*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang di temukan di lapangan, dapat di lihat bahwa berbagai permasalahan seperti kurangnya pembaruan *Website* Kampung KB, Keterbatasan jumlah penyuluh KB, serta hambatan teknis dan fasilitas secara langsung mencerminkan aspek-aspek kinerja individu sebagaimana di jelaskan oleh (Robbins dalam Drs. Daryanto & Bambang Suryanto, Ph.D. 2022:101-102). Robbins menyebutkan bahwa kinerja individu dapat di ukur melalui lima indikator, yaitu: Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektifitas, dan Kemandirian.

Fokus penelitian di jabarkan berdasarkan teori kinerja karyawan secara individu yang mencakup lima indikator. Jika dikaitkan dengan kondisi di lapangan, maka:

1. Kualitas

Kualitas kerja di ukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang di hasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kualitas kerja penyuluh KB bisa terlihat dari bagaimana mereka mampu menghasilkan laporan dan pembaruan informasi yang relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini di Kampung KB. Namun, masih banyak *Website* yang tidak

diperbarui secara berkala, menunjukkan bahwa kualitas hasil kerja belum optimal.

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang di selesaikan. Dalam konteks penyuluh KB Kuantitas kerja tercermin dari seberapa banyak desa binaan yang *Websitenya* aktif diperbarui dan dilaporkan. Dengan fenomena masalah jumlah penyuluh KB yang terbatas, output kerja mereka menjadi rendah karena harus menangani banyak desa sekaligus.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas di selesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil *output* serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu berkaitan dengan sejauh mana penyuluh mampu melaporkan kegiatan tepat sesuai jadwal. Hambatan seperti sinyal internet yang lemah dan beban kerja yang tinggi membuat pelaporan *Website* sering tertunda.

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Dalam hal ini Efektivitas dari penyuluh KB bisa terlihat dari sejauh mana penyuluh mampu memanfaatkan sumber daya (teknologi, jaringan, waktu,

tenaga) dengan baik. Namun, keterbatasan fasilitas dan kurangnya pelatihan IT menghambat penyuluh untuk bekerja secara efisien.

5. Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Kemandirian menggambarkan kemampuan penyuluh untuk melaksanakan tugas pelaporan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Namun, ternyata banyak penyuluh harus mengerjakan pelaporan sendiri tanpa dukungan operator desa, dan minimnya kemampuan teknis membuat proses ini tidak berjalan maksimal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Penyuluh KB dalam meningkatkan Klasifikasi *Website* Kampung KB di wilayah binaan Balai KB Lampihong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penyuluh KB dalam meningkatkan Klasifikasi Kampung KB?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Penyuluh KB dalam meningkatkan klasifikasi *Website* Kampung KB di wilayah binaan Balai KB Kecamatan Lampihong.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Penyuluh KB dalam meningkatkan klasifikasi Kampung KB di wilayah binaan Balai KB Kecamatan Lampihong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana peran penyuluh KB berkontribusi pada peningkatan klasifikasi Kampung KB melalui optimalisasi teknologi informasi.
- b) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran penyuluh, kualitas pelaporan, serta pengembangan Kampung KB berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti/penulis: Memberikan pengalaman nyata dalam mengkaji masalah di lapangan terkait pelaporan dan pengelolaan *Website* Kampung KB.
- 2) Bagi pemerintah daerah: Memberikan masukan serta bahan evaluasi mengenai peran mereka dalam pelaporan *Website* Kampung KB.